

**EFEKTIVITAS RELAWAN DEMOKRASI DI KOTA  
PALEMBANG DALAM MENINGKATKAN  
PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU 2019**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Politik Program Studi Ilmu Politik**

**OLEH :**

**Yosi Witriya**

**1657020139**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG**

**2020**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi dikarenakan rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintah. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia.

Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh elemen bangsa. Perubahan model sistem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah.

Masih banyak sebagian masyarakat yang menilai bahwa selama ini pemilu hanya sebagai agenda rutinitas lima tahunan yang menghabiskan uang rakyat, sementara hasil dari pelaksanaan pemilu itu sendiri belum mampu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Anggapan

seperti

ini tentunya menjadi masukan bagi penyelenggara pemilu untuk lebih baik dalam melaksanakan agenda pemilu di masa yang akan datang.<sup>1</sup>

Indonesia telah berulang kali menyelenggarakan pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada hakikatnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, dan sarana partisipasi masyarakat.

Penyelenggaraan pemilu pada awalnya hanya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres dimasukkan ke dalam rezim pemilu. Tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, dan DPD dipilih langsung oleh rakyat pada waktu yang terpisah. Tahun 2014, dengan pelaksanaan terlebih dahulu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, selanjutnya pada waktu yang berbeda dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pertama kalinya di Indonesia pada tahun 2019, dilaksanakan pemilu serentak yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta para anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak pada waktu yang

---

<sup>1</sup>Triono,(2017). Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019, Jurnal Wacana Politik, Volume 2 No. 2,h. 156-157.

bersamaan di seluruh wilayah Indonesia.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk kepastian hukum pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk membentuk peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaraan pemilu lebih demokratis. Di sisi lain, sering kali munculnya Peraturan KPU menyebabkan proses tahapan penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah peraturan KPU menjamin kepastian hukum pemilu, khususnya dalam pemilu 2019.

Pemilihan umum (Pemilu) yang digelar pada tahun 2019, sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Hal ini tentu berbeda, perbedaan tersebut menyertai teknis penyelenggaraan yang dilakukan, sehingga membutuhkan kesiapan perencanaan yang matang, ketersediaan aparatur penyelenggara yang cukup dan memiliki kompeten, serta dukungan sistem yang baik.<sup>3</sup>

Pelaksanaan pemilu 17 April 2019 secara umum relatif

---

<sup>2</sup>Ratna Herawati,DKK,(2018).Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang,Volume 4 no 3,h.830-831.

<sup>3</sup>Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,(2019).Rumah Pintar Pemilu,Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi)Pemilu,kaltim:h.1-3

berlangsung damai berjalan tertib walaupun ada beberapa kasus misalnya kekurangan surat suara keterlambatan di dalam proses distribusi dan seterusnya namun secara umum bahwa pemilu 2019 ini telah memberi gambaran positif partisipasi politik yang kemungkinan dapat dikatakan meningkat dibanding pemilu sebelumnya.<sup>4</sup>

Kehidupan masyarakat pada saat ini selalu menginginkan kemudahan dalam hidupnya. Tak terkecuali dalam hal memilih pemimpin. Masyarakat sudah pastinya menginginkan pemimpin yang dapat menyejahterakan bangsa. Namun, seringkali masyarakat mengartikan tindakan para penguasa dan elite politik hanya mementingkan kepentingan kelompoknya. Misalnya pada masa kampanye, pemimpin berlomba-lomba untuk mendapatkan hati rakyat dengan berbagai cara. Dalam konteks ini yang terjadi adalah budaya *money politic* dan penyebaran isu-isu yang belum tentu kebenarannya sering kali dipraktikan oleh para pejabat. Sebagian besar masyarakat menilai bahwa pilpres tahun 2019 ini adalah *rematch* atau tanding ulang Pilpres 2014.<sup>5</sup>

Setiap masyarakat memiliki preferensi dan kepentingan masing-masing untuk menentukan pilihan mereka dalam pemilu. Bisa dikatakan bahwa masa depan pejabat publik yang terpilih dalam suatu pemilu

---

<sup>4</sup>Immanuel Christian, Menyikapi Proses dan Hasil Pemilu 2019, [http://m.rri.co.id/post/berita/663081/kolom\\_bicara/menyikapi\\_proses\\_dan\\_hasil\\_pemilu2019.html](http://m.rri.co.id/post/berita/663081/kolom_bicara/menyikapi_proses_dan_hasil_pemilu2019.html), diakses tanggal 12 Juli 2019

<sup>5</sup> Khoiril Huda, DKK, (2018). Pemilu Presiden 2019: Antara Kontestasi Politik dan Persaingan Pemicu Perpecahan Bangsa, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 4 No 3, h.550.

tergantung pada preferensi masyarakat sebagai pemilih. Tidak hanya itu, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dapat dipandang sebagai evaluasi dan kontrol masyarakat terhadap pemimpin atau pemerintahan.

Oleh karena itu, upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik kedepan.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Poin ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekadar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu.

Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) juga telah menetapkan target kehadiran pemilih di TPS sebesar 77,5 persen. Ini tantangan berat bagi penyelenggara pemilu dan stakeholders terkait. Tidak mudah menaikkan tingkat partisipasi

---

<sup>6</sup> Daud.M.Liando,(2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Volume 3 No 2,h. 15.

pemilih dalam pemilu karena motivasi pemilih datang ke TPS bukan saja ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas. Jauh lebih berpengaruh dari itu adalah kualitas peserta pemilu, termasuk daftar calon yang diajukan oleh partai politik peserta pemilu. Karena itu, partisipasi pemilih dalam pemilu juga sangat dipengaruhi oleh kinerja partai politik dan rekam jejak calon/kandidat.<sup>7</sup>

Tantangan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada pemilu 2019 lebih berat karena semakin kompleksnya penyelenggaraan pemilu. Pemilih berhadapan dengan lima jenis surat suara di TPS. Butuh kecermatan pemilih untuk memastikan tata cara pemberian suara yang benar di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sosialisasi dan pendidikan pemilih yang lebih masif dan intensif juga dibutuhkan untuk menurunkan angka suara tidak sah atau *invalid vote* dalam pemilu.<sup>8</sup>

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum diatur oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum), baik KPU Provinsi, dan maupun KPU Kabupaten/Kota, sebagai lembaga pengawas pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang mempunyai peran sebagai penyelenggaraan dalam pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Maka dari itu, Untuk meningkatkan kualitas pemilu maka KPU (Komisi Pemilihan Umum) membuat suatu program yaitu Relawan

---

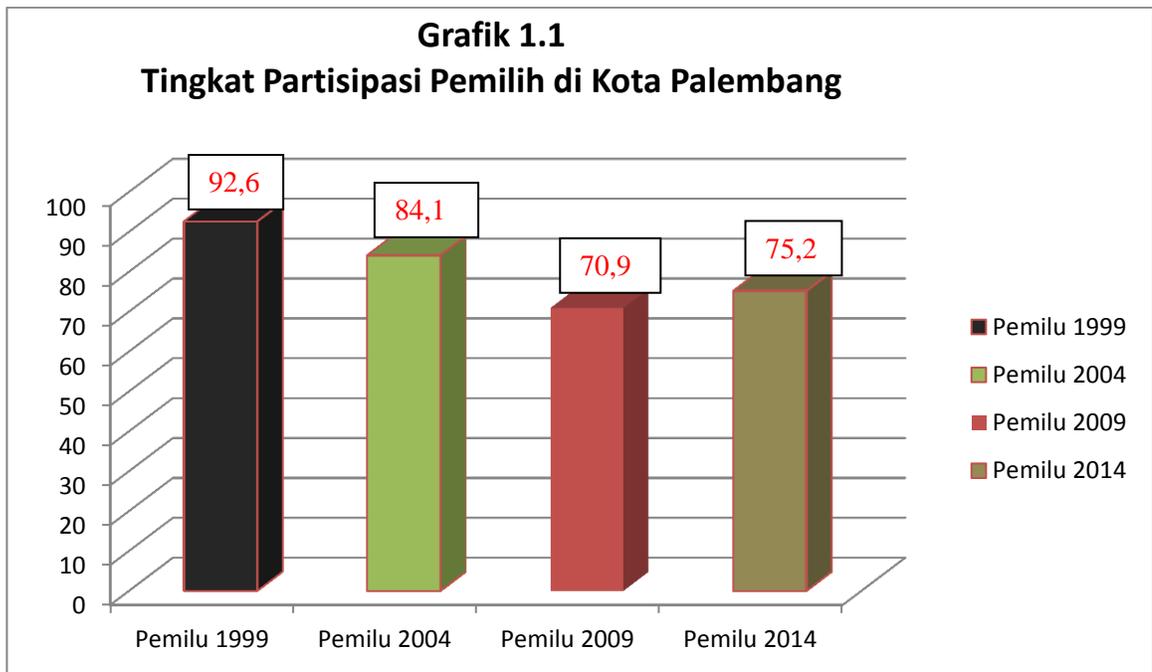
<sup>7</sup> Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,(2019).Rumah Pintar Pemilu, Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi) Pemilu,kaltim: h.1-2

<sup>8</sup> Ibid.,

Demokrasi/Relawan KPU untuk membantu meningkatkan partisipasi pemilih.

Program relawan demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor/*pioneer* demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pilukada di berbagai daerah menunjukkan indikasinya, yaitu:



**Sumber : Diolah Peneliti**

Pada grafik diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1999 tingkat partisipasi pemilihnya adalah 92,6%. Lalu pada Pemilu tahun 2004 tingkat partisipasi memilih cukup memprihatinkan yakni turun hingga 84,1%. Pada Pemilu tahun 2009 tingkat partisipasi politik memilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9%. Dan pada Pemilu tahun 2014 cukup meningkat dari tahun 2009 yaitu tingkat partisipasi memilihnya adalah 75,2%.

Banyak faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan

melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program relawan demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 10 (sepuluh) basis pemilih strategis yaitu basis keluarga, basis pemilih pemula, basis pemilih pemuda, basis pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum marginal, basis komunitas, basis keagamaan, basis warga internet dan basis relawan demokrasi. Pelopor-pelopor demokrasi akan dibentuk di setiap basis yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya.<sup>9</sup>

Program Relawan Demokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Di sisi lain, harus ada upaya untuk meningkatkan partisipasi dimana upaya antisipasi atas situasi kejenuhan dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup, mal-administrasi penyelenggaraan pemilu, adanya paham keagamaan anti demokrasi, dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrumen transformasi sosial, dan lain sebagainya.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan

---

<sup>9</sup>Ibid., h.2

kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.<sup>10</sup>

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak mudah. Di perlukan usaha yang keras dari Anggota Relawan Demokrasi tentunya akan menemui kendala-kendala yang harus dihadapi. Dan sudah menjadi bagian dari tanggung jawab mereka pula untuk mencari solusi dari kendala tersebut demi meraih target yang di inginkan.<sup>11</sup>

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas relawan demokrasi di Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilu 2019?

---

<sup>10</sup>Komisi Pemilihan Umum,(2017).Relawan Demokrasi (Relasi),”Relawan Pilgub DKI di Monas”,

<sup>11</sup>Weni Wahyu Widyastuti,(2014). Peran Relawan Demokrasi dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Legislatif di Kota Malang,Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang,Volume 1 nomor 1.

2. Bagaimana hambatan yang dihadapi relawan KPU di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang dalam Meningkatkan Partisipasi Politik pada Pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi Relawan Demokrasi di Kota Palembang dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilu 2019.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan Penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu Politik dan menjadi bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tentu lebih mendalam, khususnya mengenai Relawan Demokrasi dalam meningkatkan Partisipasi Politik.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

Relawan Demokrasi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Dalam suatu penelitian diperlukan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut:

Triono “*Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019*”.<sup>13</sup> Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pilihan politiknya terhadap pemerintahan dan negaranya. Melalui pemilu rakyat bisa memilih para wakilnya untuk duduk dalam parlemen maupun struktur pemerintah. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia pemilu menjadi upaya nyata dalam mewujudkan tegaknya demokrasi dan merealisasikan kedaulatan rakyat dengan prinsip jujur dan adil serta langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu sering disebut sebagai ajang pesta demokrasi rakyat yang menjadi cerminan ikut andilnya rakyat dalam menentukan pemimpin dan arah perkembangan bangsa. Namun dalam perkembangannya pemilu di Indonesia masih banyak kekurangan dan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperbaiki bersama oleh seluruh elemen bangsa. Perubahan model sistem pemilu dari pemilu ke pemilu berikutnya tentu menjadi hal yang dibutuhkan, hal ini dikarenakan perkembangan dan situasi perpolitikan bangsa Indonesia yang terus berubah.

Komisi Pemilihan Umum “*Relawan Pilgub DKI di Monas, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun*

2017".<sup>12</sup>Program Relawan Demokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Ratna Herawati "*Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia*".<sup>13</sup>Indonesia telah berulang kali menyelenggarakan pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pemilu merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi yang pada hakikatnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, dan sarana partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk kepastian hukum Pemilu di Indonesia terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, dalam Undang-

---

<sup>12</sup>Komisi Pemiliorhan Umum,(2017).Relawan Demokrasi (Relasi),”Relawan Pilgub DKI di Monas”,Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta,h-3.

<sup>13</sup>Ratna Herawati,DKK,(2018).Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang,Volume IV no 3,h.830-831.

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk Peraturan KPU sehingga jalannya proses penyelenggaraan pemilu lebih demokratis. Di sisi lain, seringkali munculnya Peraturan KPU menyebabkan proses tahapan penyelenggaraan pemilu mengalami perubahan sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Peraturan KPU menjamin kepastian hukum Pemilu, khususnya dalam Pemilu 2019.

Daud M.Liando "*Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat*".<sup>14</sup>

Dalam hubungannya dengan demokrasi, partisipasi politik berpengaruh terhadap legitimasi oleh masyarakat terhadap jalannya suatu pemerintahan. Upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat harus didasarkan pada analisis dan argumentasi yang kuat. Hal ini disebabkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan langkah strategis dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan penyempurnaan sistem pemilu yang lebih baik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para

---

<sup>14</sup>Daud M. Liando,(2016).Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat,Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum,Volume 3 Nomor 2,h.15.

pemimpin politik dan pemerintahan.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia “*Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi) Pemilu th 2019*”.<sup>15</sup> Pemilihan umum (Pemilu) yang digelar pada tahun 2019, sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, karena memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta memilih calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Hal ini tentu berbeda, perbedaan tersebut menyertaiteknis penyelenggaraan yang dilakukan, sehingga membutuhkan kesiapan perencanaan yang matang, ketersediaan aparatur penyelenggara yang cukup dan memiliki kompeten, serta dukungan sistem yang baik.

## **F. Kerangka Teori**

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefenisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Abdul rahmat Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.<sup>16</sup>

Dari pendapat diatas mengenai efektivitas, dapat kita simpulkan bahwa Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atas

---

<sup>15</sup>Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia,(2019).Rumah PintarPemilu,Pedoman Pelaksanaan Relasi (Relawan Demokrasi) Pemilu, kaltim:h.1.3

<sup>16</sup>Abdulrahmat, Efektivitas Implementasi, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2003), hal. 92

sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat, yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.<sup>17</sup>

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.<sup>18</sup>

a. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

---

<sup>17</sup>Soewarno Handyaningrat, Pengantar Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1996), hal 15

<sup>18</sup>M. Richard Steers, Efektivitas Organisasi, (Jakarta: Air Langga, 1999) hal. 159

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

b. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan-batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

c. Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

Menurut Gibson, Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan

sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.<sup>19</sup> David J. Lawless dalam Gibson, Invanchevich dan Donnelly mengatakan bahwa efektifitas memiliki tiga tingkatan yaitu:

#### 1. Efektivitas Individu

Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

#### 2. Efektivitas kelompok

Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektifitas kelompok merupakan jumlah kontribusi dari semua anggota dari organisasi.

#### 3. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok.

Melalui sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya. Efektivitas organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah tercapai.<sup>20</sup>

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Gibson JL JM Invanchevich, JH Donnelly, Organisasi, terjemahan Agus Dharma, (Jakarta: Erlangga, 2001), hal 120.

<sup>20</sup> <http://al-bantany-112.blogspot.com,2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html>

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.<sup>21</sup>

Kenapa peneliti memakai teori Efektivitas dari Gibson ini karena cocok untuk digunakan menganalisis permasalahan yang ada dilapangan dan sama-sama ingin mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran untuk mencapai usaha tersebut, karena tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.

## **G. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Itu mungkin dipahami sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana penelitian dilakukan secara ilmiah. Di dalamnya kami mempelajari berbagai hal langkah-langkah yang umumnya diadopsi oleh seorang peneliti dalam mempelajari masalah penelitian bersama dengan logika dibelakang mereka, para peneliti perlu mengetahui tidak hanya metode/teknik penelitian tetapi juga metodologi.<sup>22</sup> berikut ini metode yang akan digunakan peneliti di dalam penelitian:

---

<sup>21</sup>Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2002)

<sup>22</sup>C.R Kothari, (1990). Reseach Methodologi, Methods dan techniques (Second Revises Edition), india: Age International, hal.8

## 1. Pendekatan/Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menggambarkan dan menghasilkan data dalam bentuk rekaman hasil wawancara, transkrip wawancara, catatan hasil pengamatan, dokumen-dokumen tertulis, serta catatan lain yang tidak terekam selama pengumpulan data.

Melalui penelitian deskriptif kualitatif ini, peneliti menggambarkan permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan teori dan konsep berdasarkan data yang didapat. Peneliti menggunakan metode dengan tujuan untuk menyelidiki program atau aktivitas dari individu maupun kelompok, berkaitan dengan peristiwa yang sedang diteliti. Kemudian peneliti memaparkan data yang telah dikumpulkan dalam bentuk rangkaian kata-kata. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun ke lapangan untuk meneliti objek kajian.<sup>23</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data *primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari orang yang terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari observasi langsung, mengamati dan mencatat segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam

---

<sup>23</sup>Nanang Martono, (2015). Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.11

Meningkatkan Partisipasi Politik.

Selain itu data primer pada penelitian ini juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan. Ke para informan tersebut diajukan beberapa pertanyaan untuk mencari tahu Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. Selanjutnya data *sekunder* atau data penunjang dalam penelitian diperoleh melalui dokumentasi. Dokumentasi dalam penelitian ini antar lain berupa buku, jurnal, foto-foto, dokumen dan berita sehingga dapat mendukung yang berkaitan dengan Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antar pewawancara dan responden atau orang yang diwawancarai.<sup>24</sup> Proses dalam wawancara adalah tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih untuk mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan, wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang rinci, berisi pendapat, sikap dan pengalaman pribadi anggota Relawan Demokrasi dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019.

Adapun yang menjadi informasi atau sumber informasi dari

---

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, (1987), *Metdhologi Reseach II*, Yogyakarta: Andi Offset, hal.193.

penelitian ini adalah Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum), Anggota Relawan Demokrasi (Perwakilan dari 10 basis), Kasubag Bagian Teknis KPU, Kasubag Umum KPU, Masyarakat yang di datangi oleh anggota- anggota Relawan Demokrasi dari setiap basis.

## 2. Dokumentasi

Secara sederhana dokumentasi adalah proses pengumpulan data dari suatu kegiatan yang menyangkut dokumen seperti buku, jurnal, surat kabar, majalah, file, foto, video, atau rekaman suara sebagai bahan komunikasi langsung.<sup>25</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini adalah data dalam bentuk gambar, jurnal, dan data lainnya berhubungan dengan Efektivitas Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan di tetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan suah di tetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Lokasi ini bisa di wilayah tertentu atau suatu lembaga tertentu dalam masyarakat.

Adapun lokasi penelitian dari penelitian ini adalah KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Palembang Sumatera Selatan. Sedangkan fokus

---

<sup>25</sup>Nanang Martono. (2016). Metode Penelitian Sosial, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.

dari penelitian ini adalah orang-orang dan segalanya sesuatu yang terlibat dalam Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019.

#### 4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi lapangan, dan dokumentasi. Kemudian mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>26</sup>

Di dalam analisis data kualitatif menurut Nanang Martono teknik analisa data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini antara lain menggunakan tahapan sebagai berikut:

##### 1. Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dari informan, data tersebut berisi tentang hasil tanya jawab dengan informan yang ditulis secara lengkap, serta dokumentasi, hasil dari data yang diperoleh tersebut kemudian dicatat dan dikumpulkan.

##### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan,

---

<sup>26</sup>Sugiyono, (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RAD. Bandung: Alfabeta,h.244.

pengabstrakan, dan pengubahan data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada dilapangan, bila proses ini dilakukan di akhir penelitian, akan semakin banyak informasi yang harus disaring. Pada tahap ini peneliti menyaring informasi yang didapat melalui wawancara dari informan.

### 3. Penyajian Data

Penyajian data berupa aktifitas menyajikan data hasil penelitian sehingga memungkinkan peneliti mengambil keputusan sementara dan dapat merencanakan tindakan berikutnya bila ternyata masih terdapat data yang tidak lengkap, perlu klarifikasi, atau sama sekali belum diperoleh, penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data kompleks keadaan kesatuan bentuk yang sederhana dan selektif sehingga mudah untuk dipahami.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses merumuskan simpulan berdasarkan dua aktifitas sebelumnya yaitu data yang telah direduksi atau yang telah disajikan, pada tahap ini peneliti bertugas menggambarkan makna dari data yang telah disajikan. Kesimpulan ini berisi deskripsi atau gambaran dari permasalahan yang diteliti, sehingga tidak terjadi kesalahan makna dalam kesimpulan tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan Laporan**

Dalam sebuah penelitian tentu adanya tahapan-tahapan atau sistematika yang dijadikan panduan dalam penelitian sistematika laporan

yang akan peneliti buat terdiri dari bab-bab dan sub-sub bab yang di rangkum dalam 4 bab, yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, jenis penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang didalamnya terdapat tipe penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data ata, dan sistematika penulisan laporan.

## **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini dibahas mengenai gambaran umum dari lokasi penelitian dalam Peran Relawan Demokrasi di Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilu 2019.